

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan sarana pengkomunikasian informasi keuangan perusahaan oleh manajemen kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Pihak luar perusahaan yang dimaksud antara lain adalah investor, kreditur, badan-badan pemerintah, lembaga keuangan dan sebagainya. (Kieso, Donald E, 2001).

Masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang disajikan sama untuk tiap pihak. Oleh karena itu, maka laporan keuangan perlu diaudit oleh pihak yang independen (auditor independen) agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipercaya, wajar, obyektif, netral dan andal.

Dalam praktek, independensi seringkali dipertanyakan karena di satu pihak auditor dibayar oleh klien, namun di lain pihak auditor harus independen. Independensi juga lebih dipertanyakan jika auditor memberikan jasa audit (jasa auditing, pemeriksaan, review, prosedur yang disepakati) dan jasa non audit (jasa akuntansi, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen) kepada klien yang sama. Independensi auditor tersebut mencakup 3 aspek, yaitu:

- independensi dalam kenyataan (*independence in fact*), independensi yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam auditnya, secara obyektif dan tidak memihak.
- Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*), independensi ditinjau dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor.
- Independensi dipandang dari sudut keahlian. Seorang auditor dapat mempertimbangkan fakta dengan baik jika ia mempunyai keahlian mengenai audit atas fakta tersebut. (Mulyadi, Kanaka P, 1998)

Pengaruh pemberian jasa audit dan jasa konsultasi manajemen pada klien yang sama terhadap independensi menjadi lebih diperhatikan sejak terjadi skandal akuntansi di Amerika Serikat yang menimpa Enron Corporation. Enron Corporation sebagai perusahaan raksasa ke-7 terbesar dibidang energi dan perdagangan energi yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE), beromzet US\$ 100 miliar, dan laporan keuangan perusahaan tersebut dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh auditor, namun secara mengejutkan pada 2 desember 2001 dinyatakan kolaps.

Penyebab terjadinya skandal Enron, salah satunya oleh karena manajemen Enron telah melakukan window dressing, dengan cara pendapatannya di-mark up sebesar US\$ 600 juta dan menyembunyikan hutangnya (*off balance sheet*) sebesar US\$ 1,2 miliar, dengan cara membentuk LJM Partnership dimana direksi perusahaan tersebut dirangkap oleh beberapa direksi dari Enron.

Dilain pihak, KAP Arthur Andersen selaku auditor di Enron yang juga berperan ganda sebagai konsultan manajemen, keuangan dan akuntansi, kehilangan independensi dan obyektivitasnya dengan ikut membuat atau menentukan keputusan manajemen dan membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi tersebut. Berbagai kebohongan publik, penyimpangan, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen Enron yang seharusnya telah diketahui oleh auditor menjadi tidak diungkapkan, karena auditor telah kehilangan independensinya.

Skandal Enron tersebut memberikan pengaruh terhadap jasa profesi di Amerika dan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Amerika kasus tersebut membuat Pemerintahan George Bush mereformasi undang-undang pasar modal, praktek pengauditan dan tanggung jawab manajemen pada perusahaan-perusahaan di pasar modal. Di Indonesia, dampak skandal Enron, antara lain banyaknya lembaga keuangan internasional yang semakin berhati-hati dalam membidik peluang investasi di Indonesia, karena mereka ikut menderita kerugian akibat bangkrutnya Enron. Pemerintah Indonesia melalui surat keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002, dan Badan Pengembangan Pasar Modal (Bapepam) melalui peraturan No.III.A.2, membatasi pemberian jasa oleh KAP. Peraturan tersebut dibuat karena pemerintah menduga bahwa pemberian jasa konsultasi manajemen, perpajakan, penasehat investasi, penasehat keuangan dan jasa audit oleh KAP kepada klien yang sama akan mempengaruhi independensi.

Sehubungan dengan pemberian jasa konsultasi manajemen tersebut, terdapat 2 pendapat yang berbeda mengenai pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen dan

jasa audit pada klien yang sama terhadap independensi akuntan publik. Pendapat pertama, menyatakan bahwa pemberian jasa konsultasi manajemen dapat mempengaruhi independensi akuntan publik. Salah satu yang mendukung pendapat tersebut adalah SEC (Securities and Exchange Commission). Pendapat kedua, menyatakan bahwa pemberian jasa konsultasi manajemen dan jasa audit yang dilakukan oleh KAP pada klien yang sama tidak merusak independensi akuntan publik dalam pemeriksaannya, asalkan jasa tersebut terbatas sebagai penasihat manajemen dan bukan sebagai pembuat keputusan. Salah satu yang mendukung pendapat ini adalah AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). (Supriyono, 1988)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian mengenai **“Persepsi pemakai laporan keuangan atas Pengaruh Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen terhadap Independensi Penampilan Akuntan Publik”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah apakah terdapat perbedaan persepsi antara analis kredit dan manajemen atas pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen terhadap independensi penampilan akuntan publik?

1.3. Batasan Masalah

Pemakai laporan keuangan yang dimaksud adalah analis kredit diBank umum; dan staf manajemen perusahaan pemakai jasa akuntan publik, yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aspek independensi dibatasi pada independensi penampilan akuntan publik.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara analis kredit dan staf manajemen atas pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen terhadap independensi penampilan akuntan publik.

1.5. Manfaat Penelitian

Bagi Organisasi profesi (IAI), hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan standar audit bagi akuntan publik khususnya yang berhubungan dengan pemberian jasa konsultasi manajemen, agar akuntan publik

lebih dapat mempertahankan independensi penampilannya sehingga tidak memperburuk citra profesinya.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian dan tujuan penelitian.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini dijelaskan landasan teori mengenai auditing, independensi, jasa konsultasi manajemen, pengaruh jasa konsultasi manajemen terhadap independensi, akuntan publik, KAP.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang bentuk penelitian, daerah penelitian populasi penelitian, data sampel penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengukuran data, metode pengujian instrumen, dan metode analisis data.

BAB IV Data dan Analisa Data

Bab ini membahas proses penganalisan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan.

BAB V Kesimpulan & Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas hasil pembahasan yang telah dianalisis pada BAB IV.